

Zero-Waste Tourism Hub: Rancangan Model Ekonomi Sirkular untuk Destinasi Pantai Jawa Timur

Nabilah Zulfa Maulidya¹, Deny Satrio Aji²

¹Universitas Negeri Surabaya, Ketintang, Surabaya, 60231, Indonesia

²SMA IT NFBS, Ciapus, Kab. Bogor, 16610, Indonesia

*Alamat email penulis koresponden: nabilahzulfa0504@gmail.com, deny_satrio@smait-nfbsbogor.sch.id

Abstrak

Pariwisata pesisir di Jawa Timur menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan limbah yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan, keberlanjutan ekonomi lokal, dan daya saing destinasi. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model *Zero-Waste Tourism Hub* sebagai strategi inovatif berbasis ekonomi sirkular untuk mentransformasi kawasan wisata pantai menjadi ruang regeneratif yang bersih, produktif, dan inklusif. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di tiga pantai utama yaitu Pulau Merah, Pasir Putih, dan Delegan. Data dapat dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan limbah saat ini masih bersifat linier, minim partisipasi komunitas, dan belum terintegrasi dalam kebijakan pariwisata daerah. Namun, terdapat embrio praktik sirkular dari komunitas lokal, seperti bank sampah dan UMKM limbah, yang dapat diperluas melalui model sistemik. Model *Zero-Waste Tourism Hub* yang dirancang mencakup lima elemen utama yaitu zona edukasi dan pemilahan, UMKM kreatif berbasis limbah, sistem insentif digital, pusat inovasi limbah, dan kelembagaan kolaboratif tripartit. Model ini membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat daya dukung ekologi kawasan wisata. Penelitian ini berkontribusi pada literatur transformasi pariwisata berkelanjutan dan menawarkan kerangka kebijakan yang dapat direplikasi di destinasi pesisir lain di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara.

Kata kunci: ekonomi sirkular, pariwisata berkelanjutan, zero-waste, destinasi pesisir, inovasi kelembagaan

Abstract

Coastal tourism in East Java faces major challenges in waste management, which directly affects environmental quality, local economic sustainability, and destination competitiveness. This study aims to develop a Zero-Waste Tourism Hub model as an innovative circular economy-based strategy to transform coastal tourism areas into regenerative spaces that are clean, productive, and inclusive. A descriptive qualitative approach was employed, using case studies at three main beaches Pantai Kenjeran, Pasir Putih, and Delegan. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and community documentation. The findings reveal that current waste management systems remain linear, lack community participation, and are not yet integrated into regional tourism policies. However, there are emerging circular practices from local communities, such as waste banks and waste-based UMKM, that can be expanded through a systemic model. The proposed Zero-Waste Tourism Hub model comprises five key elements: educational and sorting zones, creative waste-based UMKM, a digital incentive system, a waste innovation center, and a tripartite collaborative institution. This model creates new economic opportunities while strengthening the ecological carrying capacity of tourism areas. The study contributes to the literature on sustainable tourism transformation and offers a policy framework that can be replicated in other coastal destinations across Indonesia and Southeast Asia.

Keywords: circular economy, sustainable tourism, zero-waste, coastal destinations, institutional innovation

1. PENDAHULUAN

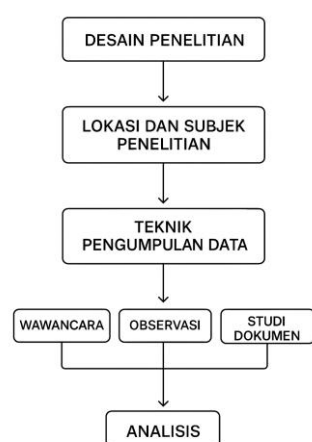
Pariwisata pesisir di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur, mengalami pertumbuhan signifikan dalam dua dekade terakhir, namun bersamaan dengan itu muncul pula peningkatan volume limbah yang tidak tertangani secara sistemik. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (DLH Jatim, 2023), kawasan wisata pantai di provinsi ini menghasilkan lebih dari 6 ton sampah per hari pada musim puncak kunjungan, dengan mayoritas berasal dari konsumsi wisatawan dan aktivitas informal yang tidak ramah lingkungan. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir seperti rusaknya habitat biota laut akibat plastik mikro, tetapi juga menurunkan daya saing destinasi secara global di tengah meningkatnya preferensi wisatawan terhadap destinasi yang mengedepankan prinsip hijau dan etika lingkungan (UNWTO, 2021). Model pengelolaan limbah yang selama ini bersifat linier seperti, ambil, pakai, dan buang, tentu sudah tidak lagi relevan menghadapi kompleksitas masalah lingkungan dan tuntutan pembangunan berkelanjutan berbasis keseimbangan sosial, ekonomi, dan ekologis.

Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi sirkular menjadi solusi strategis yang semakin diadopsi dalam transformasi sektor pariwisata global. Ekonomi sirkular merupakan sistem produksi dan konsumsi yang berfokus pada mempertahankan nilai material dan energi dalam siklus tertutup selama mungkin melalui praktik daur ulang, pemanfaatan ulang (*reuse*), desain produk ramah lingkungan, dan pengurangan limbah dari hulu (Ellen MacArthur Foundation, 2019). Beberapa praktik internasional menunjukkan keberhasilan penerapan prinsip ini dalam sektor pariwisata, seperti di Kamikatsu di Jepang yang menjadi pionir kota *zero-waste* dengan 45 kategori pemilahan sampah. Kemudian ada Slovenia, yang mengembangkan pariwisata berbasis komunitas dengan sertifikasi *Green Destination* (Gössling & Hall, 2019). Sementara itu, destinasi di Indonesia masih didominasi oleh struktur pengelolaan yang terfragmentasi, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan belum terintegrasinya sistem pengolahan limbah dalam kebijakan pengembangan pariwisata daerah (Amallia & Kustiasih, 2020). Hal ini menimbulkan urgensi untuk merancang model inovatif yang tidak hanya mengurangi timbulan limbah, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru dan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan memformulasikan *Zero-Waste Tourism Hub* sebagai model ekonomi sirkular yang dapat diterapkan pada destinasi pantai di Jawa Timur. Model ini dirancang sebagai kerangka kerja integratif yang menggabungkan pengelolaan limbah wisata, pemberdayaan UMKM lokal dalam daur ulang kreatif, pemanfaatan teknologi digital dalam insentif lingkungan, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku industri pariwisata. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan alternatif model implementatif yang adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan pesisir, sekaligus mendukung transisi menuju pariwisata regeneratif yang mampu memberikan dampak positif ganda—baik secara ekologis maupun ekonomi. Dengan demikian, studi ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi tata kelola destinasi dan kontribusi teoritis bagi kajian ekonomi sirkular dalam pariwisata berkelanjutan di negara berkembang.

2. METODE

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan metode studi kasus multipel, karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam dinamika sosial, kebijakan, praktik ekonomi sirkular, serta partisipasi aktor lokal di berbagai destinasi pantai di Jawa Timur. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Bungin (2020) yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami realitas sosial melalui proses interpretatif yang menempatkan makna dan konteks sebagai pusat analisis. Tiga lokasi penelitian dipilih secara purposif, yaitu Pantai Kenejran (Surabaya), Pantai Pasir Putih (Situbondo), dan Pantai Delegan (Gresik), karena ketiganya merepresentasikan variasi dalam pengelolaan limbah wisata, keterlibatan komunitas lokal, serta potensi pengembangan wisata berkelanjutan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk menelusuri pengalaman dan strategi para aktor, observasi di titik-titik produksi serta pengelolaan limbah, dan studi dokumen terhadap regulasi daerah, laporan dinas, serta inisiatif CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang relevan. Seluruh data kemudian dianalisis secara deskriptif interpretatif untuk menemukan pola-pola sosial dan kebijakan yang dapat mendukung model ekonomi sirkular dalam konteks pariwisata pesisir Jawa Timur. Berikut ini Adalah began alur penelitiannya :



Sumber: Olahan peneliti, 2025

Gambar 1. Bagan Alur Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi signifikan dalam kapasitas kelembagaan, tingkat kesadaran masyarakat, serta strategi kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal. Melalui pendekatan ekonomi sirkular, penelitian ini berupaya menafsir ulang sistem pengelolaan limbah pariwisata sebagai peluang produktif yang dapat mendukung ketahanan ekonomi daerah. Dengan demikian, pembahasan dalam bagian ini difokuskan pada tiga dimensi utama yakni pertama, dinamika sosial dan kelembagaan dalam pengelolaan limbah wisata, kedua, praktik inovatif menuju model ekonomi sirkular, serta ketiga rancangan konseptual *Zero-Waste Tourism Hub* sebagai model integratif pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan pesisir Jawa Timur.

Destinasi wisata pantai di Jawa Timur, seperti Pantai Kenejran di Surabaya dan Pantai Pasir Putih di Situbondo, memiliki daya tarik dan budaya yang kuat, namun juga menghadapi permasalahan klasik berupa limbah plastik, sampah organik, serta kurangnya infrastruktur sanitasi wisata (DLH Jatim, 2023). Di sisi lain, keberadaan komunitas pemuda kreatif, pelaku UMKM, dan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan mulai meningkat, menciptakan peluang untuk pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berbasis komunitas dan nilai ekonomi lokal (Anggraini et al., 2024). Pengembangan *Zero-Waste Tourism Hub* di kawasan ini dapat menjadi solusi inovatif melalui integrasi berbagai sumber daya seperti pemanfaatan limbah menjadi produk ekonomi kreatif, digitalisasi sistem insentif, hingga kemitraan antara pemerintah, pelaku wisata, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan dukungan kebijakan daerah dan kolaborasi multi-aktor, destinasi pantai di Jawa Timur dapat menjadi pionir dalam praktik ekonomi sirkular berbasis pariwisata di Indonesia.

3.2. PEMBAHASAN

3.2.1 Dimensi Sosial: Kesadaran Ekologis dan Partisipasi Komunitas

Dimensi sosial merupakan fondasi utama dalam mewujudkan konsep *Zero-Waste Tourism Hub*, sebab perubahan perilaku dan kesadaran ekologis masyarakat lokal menentukan keberlanjutan praktik ekonomi sirkular di kawasan pesisir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran ekologis masyarakat di tiga lokasi yaitu Pulau Kenjeran (Surabaya), Pasir Putih (Situbondo), dan Pantai Delegan (Gresik) masih bersifat heterogen dan berkembang secara bertahap sesuai dengan interaksi sosial, akses informasi, dan keterlibatan aktor lokal dalam aktivitas wisata. Di Pantai Kenjeran komunitas masyarakat yang telah lama berinteraksi dengan wisatawan menunjukkan tingkat literasi lingkungan yang lebih baik. Program komunitas seperti *Bank Sampah*, pengolahan hasil ikan, dan pelatihan daur ulang sisa rumah tangga menjadi wadah bagi warga untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap lingkungan wisata. Proses ini juga memperlihatkan munculnya “kepemimpinan ekologis” di tingkat lokal, di mana tokoh masyarakat dan pemuda berperan aktif menggerakkan partisipasi warga melalui kegiatan sosial yang bersifat edukatif dan produktif.

Berbeda dengan Pantai Kenjeran, masyarakat Pasir Putih Situbondo menunjukkan pola partisipasi ekologis yang masih terbatas pada kegiatan seremonial, seperti kerja bakti musiman, kampanye bersih pantai, dan lomba kebersihan antar-warga. Aktivitas tersebut memang mencerminkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya kebersihan lingkungan, tetapi belum terinternalisasi sebagai perilaku berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menempatkan tanggung jawab pengelolaan sampah pada pemerintah daerah atau pengelola wisata. Di sisi lain, Pantai Delegan Gresik menunjukkan kondisi sosial yang lebih kompleks. Masyarakat di kawasan ini relatif lebih dekat dengan kawasan industri, namun partisipasi dalam pengelolaan limbah wisata masih rendah karena adanya jarak sosial antara warga lokal dan pelaku wisata. Program pengelolaan lingkungan lebih banyak dijalankan oleh perangkat desa atau lembaga formal, sementara kesadaran individual masyarakat masih terbatas pada kepentingan ekonomi sesaat.

Analisis temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan tingkat kesadaran ekologis masyarakat sangat ditentukan oleh modal sosial (*social capital*) dan modal budaya (*cultural capital*) yang mereka miliki (Bourdieu, 1986). Komunitas yang memiliki jejaring sosial kuat dan akses terhadap pengetahuan lingkungan cenderung lebih mampu memobilisasi sumber daya kolektif untuk kegiatan keberlanjutan. Modal sosial berupa kepercayaan, gotong royong, dan solidaritas menjadi faktor pendorong utama terbentuknya partisipasi ekologis yang berkelanjutan. Sebaliknya, di wilayah dengan ikatan sosial yang lemah dan rendahnya literasi

lingkungan, partisipasi cenderung bersifat instrumental dan temporer. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun *ecological literacy* melalui pendekatan sosial yang berakar pada budaya lokal. Misalnya, kegiatan bersih pantai dapat dikontekstualisasikan dengan tradisi gotong royong atau upacara adat sebagai media internalisasi nilai-nilai ekologis.

Selain itu, penguatan kesadaran ekologis tidak hanya memerlukan edukasi formal, tetapi juga proses sosialisasi informal yang berlangsung dalam interaksi sehari-hari antarwarga. Perubahan sosial yang berkelanjutan dalam masyarakat lokal hanya dapat terjadi ketika proses komunikasi sosial berlangsung secara partisipatif dan menumbuhkan kesadaran kritis terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks ini, pelibatan aktor lokal seperti *Pokdarwis*, karang taruna, dan kelompok perempuan menjadi penting karena mereka berfungsi sebagai jembatan sosial yang dapat memperluas jangkauan informasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap destinasi wisata.

Dengan demikian, dimensi sosial dalam pembangunan *Zero-Waste Tourism Hub* bukan sekadar aspek pelengkap, tetapi merupakan pusat dari transformasi budaya menuju pariwisata berkelanjutan. Masyarakat yang sadar lingkungan bukan hanya menjadi penerima manfaat dari aktivitas wisata, melainkan juga produsen nilai ekologis dan sosial baru. Ketika kesadaran ini terinstitusionalisasi, pengelolaan limbah bukan lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai simbol identitas baru pariwisata pesisir Jawa Timur yang berbasis gotong royong, kemandirian, dan inovasi sosial.

3.2.2 Dimensi Ekonomi: Transformasi Limbah Menjadi Nilai Tambah

Dimensi ekonomi dalam pengembangan *Zero-Waste Tourism Hub* merepresentasikan pergeseran paradigma dari ekonomi linier yang berorientasi pada konsumsi dan pembuangan menuju ekonomi sirkular yang menempatkan limbah sebagai sumber daya strategis. Pengelolaan limbah dalam kerangka ini tidak lagi dilihat sebagai beban fiskal daerah, melainkan sebagai potensi nilai tambah yang dapat memperkuat ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan memperluas basis ekonomi kreatif di kawasan pesisir. Hasil lapangan menunjukkan bahwa di Pantai Kenjeran (Surabaya) telah tumbuh unit-unit mikro yang memproduksi kerajinan dari plastik bekas atau manik-manik dari cangkak keong, di Pasir Putih (Situbondo) terdapat inisiatif pembuatan pupuk organik dari sisa makanan pengunjung, sementara di Pantai Delegan (Gresik) muncul kelompok remaja yang memanfaatkan limbah botol kaca menjadi *eco-brick*. Namun, seluruh upaya tersebut masih bersifat sporadis, belum memiliki integrasi sistemik dalam rantai pasok ekonomi sirkular, dan sering kali bergantung pada dukungan sementara dari program pemerintah atau CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Keterbatasan akses modal, pasar, dan teknologi membuat banyak inisiatif berbasis limbah berhenti pada level komunitas tanpa berkembang menjadi model bisnis berkelanjutan. Padahal, secara teoritis, ekonomi sirkular dalam konteks pariwisata berpotensi menciptakan nilai ekonomi signifikan melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang dikembangkan dalam bentuk model usaha kreatif, layanan berbasis jasa lingkungan, dan sistem insentif ekologis (Ellen MacArthur Foundation, 2013; Geissdoerfer et al., 2017). Dalam konteks ini, *Zero-Waste Tourism Hub* menawarkan tiga jalur ekonomi strategis. Pertama, pengembangan produk kreatif berbasis limbah, seperti *eco-craft*, *eco-souvenir*, dan *eco-fashion* yang menjadikan limbah sebagai material estetika bernilai jual tinggi. Model ekonomi kreatif ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal, terutama perempuan pesisir. Studi terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ekonomi sirkular pariwisata mampu memperkuat

ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mendorong transformasi sosial di komunitas pedesaan (Vujko, 2024)

Kedua, penguatan model layanan sirkular (*circular service models*), yaitu transformasi pengelolaan sampah menjadi jasa ekonomi produktif seperti pengumpulan terjadwal, pengomposan terpusat untuk kebutuhan agro-wisata, hingga produksi *eco-brick* untuk infrastruktur destinasi. Model ini menciptakan rantai nilai baru yang tidak hanya menghasilkan pendapatan tetapi juga memperpanjang siklus hidup sumber daya lokal. Ketiga, Penerapan skema pembiayaan inovatif, seperti waste credit, dana mikro untuk UMKM berbasis limbah, serta insentif pajak bagi operator wisata ramah lingkungan menjadi sangat penting karena insentif ekonomi terbukti efektif mendorong adopsi prinsip sirkularitas di tingkat lokal (Alfarizi, 2023)

Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, inisiatif *Zero-Waste Tourism Hub* memiliki potensi besar dalam memperkuat *multiplier effect* pariwisata—yakni ketika keuntungan dari satu sektor (pengelolaan limbah) mengalir ke sektor lain seperti kerajinan, pertanian organik, hingga jasa wisata. Dampak ini tidak hanya menambah perputaran ekonomi daerah, tetapi juga menurunkan biaya eksternalitas lingkungan yang selama ini ditanggung pemerintah daerah akibat pengelolaan sampah konvensional. Dengan kata lain, pendekatan ekonomi sirkular menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab ekologis, sebagaimana diketahui bahwa ekonomi lokal yang berkelanjutan lahir dari integrasi antara nilai-nilai sosial, inovasi ekonomi, dan perilaku komunitas dalam sistem produksi dan konsumsi.

Namun demikian, perlu kehati-hatian agar ekonomi sirkular tidak terjebak dalam komodifikasi lingkungan yang dangkal. Jika model bisnis sirkular hanya berorientasi pada keuntungan finansial tanpa memperhatikan distribusi manfaat bagi masyarakat lokal, maka keberlanjutannya akan rapuh. Karena itu, *Zero-Waste Tourism Hub* harus memastikan keadilan ekonomi melalui transparansi rantai nilai, harga jual yang layak, dan pelibatan komunitas dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini bukan sekadar efisiensi ekonomi, tetapi upaya rekonstruksi relasi sosial yang memungkinkan masyarakat menjadi produsen nilai, bukan hanya penerima dampak kebijakan. Dalam kerangka ini, ekonomi sirkular menjadi instrumen transformatif yang menghubungkan keberlanjutan lingkungan dengan kesejahteraan manusia, menjadikan kawasan pantai Jawa Timur bukan sekadar destinasi wisata, tetapi laboratorium sosial bagi masa depan pariwisata berkelanjutan Indonesia.

3.3.3 Dimensi Kelembagaan: Kolaborasi, Kebijakan, dan Tata Kelola Adaptif

Dimensi kelembagaan menjadi fondasi penting dalam keberhasilan implementasi model *Zero-Waste Tourism Hub*, karena keberlanjutan ekonomi dan sosial tidak mungkin terwujud tanpa sistem tata kelola yang partisipatif dan responsif terhadap konteks lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan pengelolaan limbah di kawasan wisata pantai Jawa Timur masih berorientasi pada pendekatan teknokratik yang berpusat pada pemerintah daerah dan bersifat *top-down*. Sementara partisipasi komunitas, pelaku usaha, serta lembaga nonpemerintah masih bersifat sporadis. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan desain kelembagaan yang tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga memediasi dan memberdayakan warga agar menjadi subjek aktif dalam transformasi sosial-ekonomi.

Struktur tata kelola yang ada di Pantai Kenjeran, Pasir Putih, dan Deigan menunjukkan variasi peran dan inisiatif lokal. Di Pantai Kenjeran, pengelolaan limbah diatur oleh *Pokdarwis* (Kelompok Sadar Wisata) bekerja sama dengan lembaga desa dan pelaku UMKM. Namun, masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara dinas pariwisata dan lingkungan hidup, yang

menyebabkan kurang sinkronnya program. Di Pasir Putih, kerja sama lintas lembaga mulai muncul melalui inisiatif *bank sampah wisata* yang didukung oleh pemerintah kabupaten dan BUMDes. Sementara di Delegan, peran swasta cukup dominan melalui kemitraan CSR industri sekitar, namun partisipasi komunitas belum optimal. Variasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan model ekonomi sirkular bergantung pada kualitas jaringan kelembagaan (institutional networking), bukan semata pada regulasi formal.

Dalam konteks *Zero-Waste Tourism Hub*, tata kelola adaptif menjadi kunci: pendekatan ini menekankan kemampuan lembaga untuk belajar dari praktik lokal, bereksperimen, dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan umpan balik dari komunitas (Agustin & As'ari, 2022; Fathani et al., 2023). Tata kelola adaptif memungkinkan kebijakan pariwisata bersifat fleksibel, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan sosial maupun ekologis. Misalnya, pengelolaan limbah organik diubah menjadi kompos dengan sistem insentif komunitas, lalu hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki mekanisme distribusi atau harga jual. Mekanisme pembelajaran semacam ini memperkuat kolaborasi antar-aktor dan mendorong munculnya inovasi kelembagaan berbasis lokalitas. Lebih jauh, model kelembagaan *Zero-Waste Tourism Hub* menuntut terbangunnya tiga lapisan sinergi yaitu :

- a. Sinergi vertikal, yaitu penyelarasan antara kebijakan pusat–provinsi–kabupaten untuk menghindari tumpang tindih dan menciptakan arah strategis nasional bagi pariwisata hijau.
- b. Sinergi horizontal, yakni koordinasi lintas sektor antara dinas pariwisata, lingkungan hidup, koperasi, dan UMKM.
- c. Sinergi diagonal, berupa kemitraan multipihak yang melibatkan komunitas, akademisi, industri, dan lembaga keagamaan dalam satu jejaring kolaboratif. Bentuk sinergi terakhir inilah yang paling potensial menghasilkan inovasi sosial karena berangkat dari pengetahuan lokal dan solidaritas komunitas (Ostrom, 2010).

Selain itu, keberhasilan kelembagaan juga sangat ditentukan oleh aspek legitimasi dan transparansi. Keberlanjutan sebuah model ekonomi sirkular bukan hanya persoalan teknis daur ulang, tetapi juga etika tata kelola yang mengedepankan akuntabilitas, distribusi manfaat yang adil, dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan. Pengalaman di beberapa destinasi memperlihatkan bahwa pelibatan masyarakat dalam perumusan peraturan desa wisata, perancangan sistem insentif, dan pengawasan program pengelolaan sampah mampu meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dan tanggung jawab kolektif terhadap destinasi (Darmi & Aryanti, 2022). Karena itu, kelembagaan yang efektif bukan hanya soal struktur, tetapi juga budaya partisipasi yang ditumbuhkan melalui pendidikan, musyawarah, dan kolaborasi lintas generasi.

Dengan demikian, dimensi kelembagaan dari *Zero-Waste Tourism Hub* dapat dipahami sebagai ruang sosial yang menghubungkan regulasi, pengetahuan lokal, dan inovasi kolektif. Ia bekerja bukan melalui kontrol semata, tetapi melalui pembelajaran sosial yang berkelanjutan. Jika pemerintah daerah mampu berperan sebagai *enabler* fasilitator yang menghubungkan jejaring komunitas, pelaku usaha, dan lembaga Pendidikan, maka ekosistem pariwisata Jawa Timur dapat tumbuh sebagai model laboratorium kelembagaan berkelanjutan. Dalam konteks global, tata kelola adaptif seperti ini tidak hanya memperkuat posisi Jawa Timur sebagai destinasi wisata hijau, tetapi juga menempatkannya sebagai pionir dalam transisi menuju ekonomi sirkular berbasis komunitas di Asia Tenggara.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa model *Zero-Waste Tourism Hub* di destinasi pantai Jawa Timur bukan sekadar konsep teknis pengelolaan limbah, melainkan kerangka transformasi sosial-ekonomi berbasis ekonomi sirkular yang menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transisi menuju pariwisata berkelanjutan sangat bergantung pada tiga dimensi kunci yakni kesadaran sosial yang membangun perilaku ekologis, inovasi ekonomi yang mengubah limbah menjadi nilai tambah, serta tata kelola kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif. Untuk memperkuat keberlanjutan model ini, diperlukan kebijakan daerah yang memberikan insentif fiskal bagi pelaku wisata hijau, pembentukan jejaring inkubator UMKM limbah, dan pengembangan sistem pembelajaran sosial lintas aktor. Dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam satu ekosistem pariwisata sirkular, Jawa Timur berpotensi menjadi laboratorium nasional bagi praktik *zero-waste tourism* yang inklusif, produktif, dan kompetitif di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. (2023). Determinasi adopsi ekonomi sirkular, model bisnis inovatif dan dukungan anggaran negara: investigasi umkm indonesia berbasis pls-sem. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 16(1), 37-56.
- Amallia Ashuri & Kustiasih, T. (2020). *Timbulan dan komposisi sampah wisata pantai Indonesia, studi kasus: Pantai Pangandaran*. *Jurnal Permukiman*, 15(1), 1-9. tersedia di: <https://jurnalpermukiman.pu.go.id/index.php/JP/article/view/277>
- Anggraini, T., Hidayatullah, N. L., Syaputri, A. T., Ardana, B. D., & Wibawani, S. (2024). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah “Sido Makmur” di RW 05 Kelurahan Sidoserma Kota Surabaya*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 16630–16642. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12196>
- Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Darmi, T., & Aryanti, M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada kawasan wisata pantai. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration*, 3(2). <https://doi.org/10.31539/joppas.v3i2.5183>
- DLH Jatim. (2023). *Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Jawa Timur*. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
- Ellen MacArthur Foundation. (2019). *Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change*. <https://ellenmacarthurfoundation.org>
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The circular economy — A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>
- Hall, C.M., Gossling, S., & Scott, D. (Eds.). (2015). *The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203072332>
- UNWTO. (2021). *Circular Economy in Tourism: A Roadmap for Transition*. Madrid: World Tourism Organization.
- Vujko, A., Karabašević, D., Cvijanović, D., Vukotić, S., Mirčetić, V., & Brzaković, P. (2024). Women’s Empowerment in Rural Tourism as Key to Sustainable Communities’ Transformation. *Sustainability*, 16(23), 10412. <https://doi.org/10.3390/su162310412>